

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2024



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala pertolongan-Nya, sehingga penyusunan "Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024" telah diselesaikan. LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 ini, dimaksudkan untuk mendeskripsikan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2024, sekaligus sebagai wujud dari hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan memperlancar penyusunan LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan adanya saran demi penyempurnaan penyusunan LKj pada tahun berikutnya. Semoga LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balige, 05 Februari 2024

**Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Toba**

**dr. Juliwan Hutapea
Pembina Utama Muda
NIP. 197107012001121001**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum	3
1. Organisasi Perangkat Daerah	3
2. Tugas dan Fungsi	4
3. Sumber Daya Aparatur	17
4. Sarana dan Prasarana	17
5. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2024	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	19
A. Perencanaan Strategis	19
1. Visi	19
2. Misi	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja DPPKB Kab. Toba	24
A.1 Capaian Kinerja Utama	25
A.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s/d 2024	31
A.3 Realisasi dan Target RPJMD sesuai Renstra	32
A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja	34
A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan	34
A.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	38
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Langkah-langkah Kedepan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Kinerja	51
C. Informasi Keuangan	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan sasaran strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun

2024 serta sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Toba di tahun yang akan datang. Adapun tujuan Implementasi Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pembangunan daerah dan nasional, mempunyai komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sekaligus dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Clean Government*), salah satunya diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, meliputi perencanaan strategis partisipatif, pengelolaan keuangan, penganggaran dan akuntansi, pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) yang konsisten dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sistem pengelolaan anggaran sebagaimana tersebut di atas, diharapkan tercipta mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Toba, akan dilakukan evaluasi secara terus-menerus dan berkesinambungan, Rencana Jangka Menengah Tahun 2021–2026 Kabupaten Toba, Rencana Strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Toba.

Sebagai hasil akhir pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Toba, diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja Program Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diikuti oleh peningkatan kinerja SDM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan partisipasi aktif masyarakat dalam penggerakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Toba.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024, merupakan sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024, sekaligus untuk mengukur tingkat pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

Tujuan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
4. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, dengan harapan agar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya menjadi lebih efektif, efisien dan reposif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pelayanan Program Keluarga Berencana.

C. GAMBARAN UMUM

1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Bupati Toba Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba maka juga diikuti dengan perubahan struktur organisasi dan tugas pokok organisasi/ masing- masing jabatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan kewenangan dan tugas pembantu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. TUGAS DAN FUNGSI

Rincian dan Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kelompok jabatan fungsional;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Sekretaris;

- a. penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya;
- b. pengkoordinasian penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengorganisasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengelolaan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

- h. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- l. pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. pengkoordinasian penyusunan laporan aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- a. menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsiapan dan dokumentasi, keprotokoleran serta hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lainy yang diberikan oleh Sekretaris Dinas;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

4. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
- b. mengkoordinir penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- f. melaksanakan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- i. menyusun laporan keuangan;
- j. menyusun rencana pengelolaan data teknologi informasi;
- k. mengembangkan sistem informasi;
- l. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- m. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- n. mengelola dan menyediakan data dan informasi;
- o. mengelola dan melayani informasi publik;
- p. menyelenggarakan publikasi;
- q. mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- r. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- s. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- t. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi publik sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- u. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- v. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;
- w. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;
- x. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

- a. menyusun bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. melaksanakan kebijaksanaan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- e. melaksanakan NSPK, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan keluarga berencana;
- f. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam raangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. melaksanakan pendayagunaan tenaga PLKB/PKB;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.

6. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;

- a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta IMP;
- d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta IMP;
- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta IMP;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan peta aera prioritas kerja kegiatan penyuluhan KB;
- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang advokasi, pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan IMP;
- h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

- pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan hari besar yang berhubungan dengan keluarga dan perlombaan dalam rangka Hari Keluarga;
- i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian institusi masyarakat pedesaan, pembantu pembina keluarga berencana desa / sub PPKBD;
 - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasi dan penggerakan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
 - k. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - l. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
 - m. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

7. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

- a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyebarluasan, pengembangan informasi dan data mikro kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;

- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan didaerah;
- h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan iklan layanan KB, baliho dan papan motivasi KB;
- i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penerangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui sarana mobil unit pelayanan KB;
- j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyerasian isu kependudukan kedalam program pembangunan didaerah;
- k. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
- l. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

8. Bidang Keluarga Berencana;

- a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang KB;
- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang KB;
- e. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB;
- f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- g. melaksanakan pelayanan KB di Kabupaten
- h. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang KB

- j. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang KB
- k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.

9. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

- a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA jaminan pelayanan KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan, pengelolaan dan pengendalian penetapan kebijakan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- d. melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana di rumah sakit;
- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana
- h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata;

- j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan distribusi, pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- k. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- l. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan *informed choice atau informed consent* dalam program keluarga berencana;
- m. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- n. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebijakan penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- o. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- p. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
- q. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

10. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB;

- a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan materi pembinaan penyuluh keluarga berencana;

- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian peningkatan kesertaan dan keadilan gender terutama partisipasi KB Pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan dan data tentang PUS, TFR, Kesertaan ber-KB;
- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pembudayaan dan mengembangkan NKKBS;
- j. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
- k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

11. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
- f. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;

- h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan;
- n. melaksanakan / mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting.

12. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

- a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan kebijakan program pemberdayaan ekonomi;
- d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan dukungan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyerasian penetapan kriteria pemberdayan keluarga sejahtera;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan model-model kegiatan pemberdayan ekonomi keluarga;
- h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dalam kelompok UPPKS;
- i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
- j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kemitraan

- untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan keluarga;
- k. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat structural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
 - l. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - m. melaksanakan/mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting.

13. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Ketahanan Keluarga;

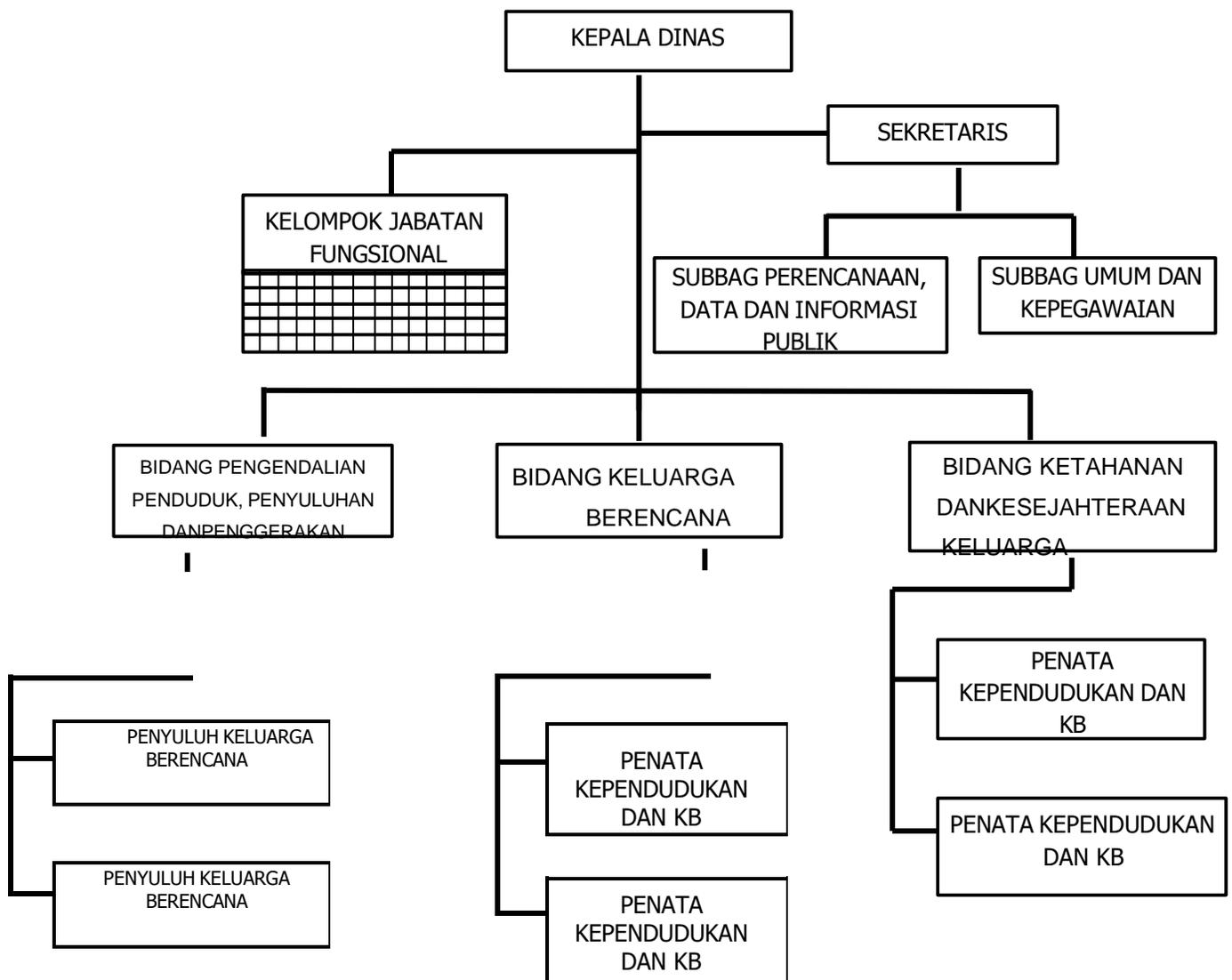
- a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan ketahanan keluarga;
- d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan keluarga;
- e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan sasaran BKB, BKR, BKL dan Kelompok PIK R/M;
- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan terhadap BKB, BKR, BKL dan Kelompok PIK R/M;
- h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan ketahanan keluarga;
- i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan keluarga;
- j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan monitoring

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program desa /kelurahan binaan;melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- k. melaksanakan / mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting. Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sebagai berikut ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba



3. Sumber Daya Aparatur

Kondisi Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, berdasarkan data tanggal 30 Desember 2024 sejumlah 23 orang PNS, ditambah dengan 5 orang Tenaga Kontrak SKPD, yaitu:

a. Pejabat Struktural

1. Eselon II-B (Kepala) : 1 orang
2. Eselon III-A (Sekretaris) : 1 orang

b. Pendistribusian Pegawai

1. Sekretariat : 8 orang
2. Bidang Pengendalian Penduduk : 5 orang
3. Bidang Keluarga Berencana : 8 orang
4. Bidang Ketahanan Keluarga : 7 orang

c. Berdasarkan strata pendidikan

1. S2 : 2 Orang
2. S1 : 18 Orang
3. Diploma 3 : 5 Orang
4. SLTA : 6 Orang
5. SLTP : - Orang
6. SD : - Orang

Berdasarkan data tersebut di atas, bahwa tingkat pendidikan personil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tergolong baik, sehingga sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|----------|
| Mobil Kijang Inova | = 1 unit |
| Mobil Unit Pelayanan KB | = 1 unit |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

Mobil Pengangkut Akseptor (Mini Bus)	= 1 unit
Mobil Unit Penerangan (Mupen)	= 1 unit
Mobil Unit Alat Kontrasepsi	= 1 unit
Sepeda Motor	= 27 unit
Mesin Fotocopy	= 1 unit
Laptop/Note Book	= 10 unit
Komputer PC	= 9 unit
Proyektor LCD	= 3 unit
Publik Address	= 1 set

5. Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2024		Capaian Kinerja(%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Ketahanan Keluarga	%	0,66	0,51	77,27
2	TFR (Total Fertility Rate) per WUS usia 15-49 Tahun	%	3,35	1,017	30,35
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	%	11,9	7,97	66,97

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tahun 2024 dapat dijelaskan berdasarkan sasaran program, yang diukur menurut indikator kinerja sasaran, yaitu:

1) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran mengendalikan laju pertumbuhan penduduk diukur berdasarkan indikator kinerja dibawah ini, yaitu:

- a) Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49) Tahun dari target 3,35% realisasi sebesar 1,017%. Data tersebut menjadi gambaran bahwa adanya keberhasilan pelayanan KB. Angka TFR yang menurun merupakan kondisi yang baik.
- b) Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) tercapai sebesar 7,97% dari target 11,9%. Unmeet Need juga merupakan Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak menggunakan kontrasepsi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) RPJPD 2021-2026;
- 2) RPJMD 2021-2026;
- 2) Perubahan Renstra DPPKB 2021-2026;
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Secara ringkas substansi Renstra tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KabupatenToba selaku penyelenggara urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar, yaitu Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya guna mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas tertuang dalam Visi Kabupaten Toba yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”

2. Misi

Berdasarkan Visi tersebut, dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah **“Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal”** dengan mendukung Misi ke-2 (Kedua), yaitu **“Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal**, yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan sasaran yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TOBA

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga		Indeks Ketahanan Keluarga	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00
			Tingkat Penurunan TFR (Total Fertility Rate) per WUS usia 15-49 Tahun	3,59	3,58	3,57	3,56	3,55
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12,10	12,00	11,90	11,80	11,70
			Persentase Peserta KB Aktif	77,45	77,50	77,55	77,60	77,65
			Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	18,90	18,95	19,00	19,05	19,10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

		Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25
		Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	88,46	92,30	96,15	100,00	100,00
		Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,10	29,05	29,00	28,95	28,90
		Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
		Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00
		Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
		Persentase Kelompok UPPKS yang ber-	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

		KB Mandiri					
		Persentase Kelompok PIK R/M	100	100	100	100	100
		Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	24	24	24	24	24

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba menyusun perjanjian kinerja di tandatangani oleh Bupati Toba. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DPPKB Kabupaten Toba sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2024		Capaian Kinerja(%)
			Target	Realisas	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Ketahanan Keluarga	%	0,66	0,51	77,27
2	TFR (Total Fertility Rate) per WUS usia 15-49 Tahun	%	3,35	1,017	30,35
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	%	11,9	7,97	66,97

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DPPKB KABUPATEN TOBA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, didasarkan pada hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja dengan berdasarkan pada tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Toba (Khususnya Misi 2 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal).

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, target capaian, realisasi dan pengukuran berdasarkan pembobotan dari masing- masing kegiatan atau mencakup Input, output dan outcome. Pada tahun anggaran 2024, masing- masing indikator kinerja telah ditetapkan rencana capaian kerjanya, yang di dalamnya mencakup sasaran yang mengindikasikan ukuran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.

Adapun cara menghitung indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase				
Pencapaian			X	100%
Rencana Tingkat	=	Realisasi		
Capaian		Rencana		

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase				
Pencapaian				
Rencana Tingkat	=	$\frac{\text{Rencana- (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}}$	x	100%
Capaian				

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksana kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 ke atas	Sangat Berhasil
2	70 x < 85	Berhasil
3	55 x < 70	Cukup Berhasil
4	X < 55	Kurang Berhasil

A.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 telah mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan indikator, sebagaimana terlihat pada tabel berikut

1. (TFR) Total Fertility Rate

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Realisasi capaian angka kelahiran total per WUS (25-49 tahun) untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
TFR (Total Fertility Rate) Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Total Fertility Rate (TFR)	3,35	1,017	30,35

Sumber data : New Siga dan Pendataan Keluarga

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKS 1 adalah 1,017 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 3,35 maka capaiannya sebesar 30,35 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai TFR pada Tahun 2024 adalah sebagaiberikut:

1. Melaksanakan Program Generasi Berencana (GenRe) yang mempromosikan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan remaja
2. Peningkatan akses pelayanan KB dan jesehatan reproduksi melalui penguatan fasilitas kesehatan melayani KB;
3. Meningkatkan upaya promosi dan KIE tentang isu kependudukan;

Pencapaian kinerja untuk Indikator TFR (Total Fertility Rate) adalah sebagai berikut :

TFR (Total Fertility Rate)

$$\frac{5 \times (\text{ASFR1} + \text{ASFR2} + \text{ASFR3} + \text{ASFR4} + \text{ASFR5} + \text{ASFR6} + \text{ASFR7})}{1.000} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator TFR (Total Fertility Rate) adalah sebagai berikut :

TFR (Total Fertility Rate)

$$= \frac{5 \times (0,41 + 11 + 73 + 92 + 24 + 2 + 1)}{1.000}$$

**Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian TFR
Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

IKS	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) perW U S (15-49)	3,58	3,36	94	3,35	1,017	30,35

Sumber data : New Siga dan Pendataan Keluarga

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi TFR sudah menunjukkan keberhasilan tahun 2024 mengalami keberhasilan. Semakin rendah capaiannya menggambarkan semakin baik kinerja yang dihasilkan. Melalui data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produksinya ialah 1 orang.

2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) adalah persentase wanita yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Realisasi capaian Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja untuk Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) adalah sebagai berikut :

$$\text{Cakupan PUS yang ingin ber - KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)} = \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber - KB tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja untuk Indikator cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) adalah sebagai berikut :

$$\text{Cakupan PUS yang ingin berKB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)} = \frac{1.734}{21.748} \times 100\%$$

**Tabel 4 Perbandingan Target dan Realisasi
Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Tahun 2024**

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	11,9	7,97	66,97

Sumber data : New Siga dan Pendataan Keluarga

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 7,97 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 11,9 maka capaiannya adalah sebesar 66,97 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan *unmeet need* pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kontrasepsi kepada masyarakat dan memberikan kesempatan untuk membuat pilihan penggunaan kontrasepsi dengan penuh kesadaran kepada masyarakat;
2. Mendayagunakan PPKBD/Sub PPKBD dan Kelompok KB untuk melakukan penyuluhan KIE di setiap Posyandu yang difasilitasi melalui anggaran DAK Non Fisik.

Adapun perbandingan target dan realisasi *unmeet need* pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2023-2024) dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

**Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian
Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

IKS	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	12,00	13,46	112	11,9	7,97	66,97

Sumber data : New Siga dan Pendataan Keluarga

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian realisasi IKS 2 dari 2024 mengalami kenaikan, dimana dari tahun 2023 realisasi 112 persen menjadi 66,97 persen. Agar target penurunan unmeet need semakin meningkat perlu dilakukan perbaikan yaitu dengan meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui advokasi terutama penggarapan program KB dan reproduksi serta peningkatan penggarapan wilayah daerah terpencil melalui pelayanan bergerak untuk menjangkau PUS yang masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses pelayanan KB; mengadvokasi organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia untuk mendorong Bidan menjadi jejaring fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; peningkatan kapasitas PKB dan IMP dalam memberikan KIE KB serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi terkait KB kepada masyarakat; dan penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan motivator KB Pria dalam mendukung program KB dan kesehatan reproduksi.

B. Indeks Ketahanan Keluarga

Indeks Ketahanan Keluarga adalah indikator yang menunjukkan kondisi dinamik keluarga dalam mengelola masalah uang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkulaitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan Nasional. Realisasi capaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja untuk Indikator indeks ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

Di bawah ini disajikan data Indeks Ketahanan Keluarga

Tahun 2022 s/d 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		2024		Keterangan	Rumus
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks Ketahanan Keluarga	%	0,64	0,48	0,65	0,50	0,66	0,51	Jumlah KB Aktif = 13.816 Jumlah PUS = 21.748 Jumlah Anggota BKB = 7662 Jumlah Sasaran BKB = 9096 Jumlah Anggota BKR = 12578 Jumlah Sasaran BKR = 17397 Jumlah Anggota BKL = 6694 Jumlah Sasaran BKL = 10546 Jumlah Sekolah SLTP yg mendapat Pendidikan Kependudukan = 6 Jumlah SLTP = 50	$((\text{Partisipasi KB Aktif}/\text{Jumlah PUS} \times 40\%) + (\text{Jumlah Keluarga yang masuk Kelompok BKB}/\text{Jumlah Keluarga Sasaran BKB} \times 10\%) + (\text{Jumlah Keluarga yang masuk Kelompok BKR}/\text{Jumlah Keluarga Sasaran BKR} \times 10\%) + (\text{Jumlah Keluarga yang masuk Kelompok BKL}/\text{Jumlah Keluarga Sasaran BKL} \times 10\%) + (\text{Jumlah Sekolah SLTP yang mendapatkan Pendidikan Kependudukan} / \text{Jumlah SLTP} \times 30\%))$

Tabel 7 Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024

IKS	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Ketahanan Keluarga	0,66	0,51	77,27

Sumber data : New Siga dan Pendataan Keluarga Berdasarkan

tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 0,51 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,66 maka capaiannya adalah sebesar 77,27 persen.

B.1 REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 s/d 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Toba memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja, hal tersebut juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Indikator tersebut diharapkan dapat mencapai target setiap tahunnya, yang digambarkan melalui realisasi dan capaian kinerja dari setiap indicator yang telah ditetapkan. Dibawah ini disajikan tabel perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2024

TABEL 3.1
Realisasi dari Capaian Tahun 2023 s/d 2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Toba

NO.	Indikator	Target Capaian Indikator Tahun 2023	Realisasi Indikator Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 (%)	Target Capaian Indikator Tahun	Realisasi Indikator Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 (%)
1	Indeks Ketahanan Keluarga	0,65	0,50	77%	0,66	0,51	77,27%
2	TFR (Total Fertility Rate)	3,58	3,36	94%	3,57	1,017	28,49%
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12,00	13,46	112%	11,90	7,97	66,97%

B.2 REALISASI DAN TARGET JANGKA MENENGAH SESUAI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba harus mengacu pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 tersusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba setiap tahun.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 namun pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis belum maksimal dilakukan karena pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk pencapaian target kinerja belum dapat dilakukan akibat kebijakan Pemerintah dalam mengatasi penularan Covid-19 yang semakin merebak sehingga dilakukan pembatasan kegiatan dalam waktu yang belum dapat ditentukan kapan berakhir. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 dan 2024 berjalan sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Di bawah ini disajikan tabel mengenai perbandingan antara realisasi dan target Jangka Menengah sesuai Renstra DPPKB Kab. Toba.

TABEL 3.2
TARGET DAN REALISASI JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TOBA

NO.	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1	Indeks Ketahanan Keluarga	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,50	0,51	
2	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	22,93	24	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,015	0,014	
4	TFR (Total Fertility Rate)	3,59	3,58	3,57	3,56	3,55	3,36	1,017	
5	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan	88,46	92,30	96,15	100,00	100,00	92,3	92	
6	Persentase Peserta KB Aktif	77,45	77,50	77,55	77,60	77,65	61,65	62,34	
7	Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	18,90	18,95	19,00	19,05	19,10	15,53	17,81	
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12,10	12,00	11,90	11,80	11,70	13,46	7,97	
9	Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,48	0,41	
10	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,10	29,05	29,00	28,95	28,90	42,53	36,46	
11	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	64,74	65,11	
12	Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	49,3	50,1	
13	Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	34,44	35,27	
14	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	54,9	36,64	
15	Persentase Kelompok PIK R/M	100	100	100	100	100	11,07	316,67	
16	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	24	24	24	24	24	≥20	≥26	

B.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja ada 3 (tiga) Indikator Program yang telah dilaksanakan, melalui data yang telah dikumpulkan dapat dilihat bahwa kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan (kinerja yang semakin baik). Ketiga Indikator Program yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja tersebut seperti Indeks Ketahanan Keluarga yang mencapai realisasi 0,51 persen naik dibandingkan tahun lalu sebanyak 0,01 persen, kenaikan tersebut memang tidak signifikan, namun hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak menurun namun tetap mengalami progress. Kemudian yang kedua adalah Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dengan realisasi sebesar 7, 97 persen hal tersebut dianggap baik karena kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat yang ingin ber-kb itu semakin banyak, artinya sedikit yang tidak terlayani pelayanan kb yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Indikator yang terakhir adalah mengenai Total Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*) tahun ini realisasinya adalah sebesar 1,017 persen, hal ini dianggap bagus juga karena kondisi tersebut menggambarkan adanya penurunan dari tingkat kelahiran artinya Program ber-KB yang dicanangkan oleh Pemerintah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Toba oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keberhasilan tersebut diakibatkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut ber-KB dan menyadari bahwa pentingnya anak yang berkualitas dari segi fisik maupun kesehatan bukan banyaknya anak (kuantitas).

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melakukan Perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai target anggaran pada Rencana Kerja dengan Realisasi Anggaran yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Di bawah ini disajikan tabel mengenai efisiensi penggunaan sumber daya oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Toba tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI CAPAIAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.538.161.153	3.340.783.304	197.377.849	94%
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.861.612	12.324.812	536.800	96%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.861.612	12.324.812	536.800	96%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.749.611.800	2.638.452.193	111.159.607	96%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.749.611.800	2.638.452.193	111.159.607	96%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.614.761	291.041.154	1.573.607	99%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.951.321	114.921.101	30.220	100%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.440	4.999.440	-	100%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600.000	600.000	-	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.064.000	170.520.613	1.543.387	99%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.216.180	45.995.200	2.220.980	95%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.216.180	45.995.200	2.220.980	95%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.740.000	149.941.756	58.798.244	72%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.800.000	3.831.756	2.968.244	56%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.940.000	146.110.000	55.830.000	72%			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI CAPAIAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	226.116.800	203.028.189	23.088.611	90%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.900.000	184.828.189	23.071.811	89%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.216.800	18.200.000	16.800	100%
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	389.052.500	328.281.478	60.771.022	84%
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	389.052.500	328.281.478	60.771.022	84%
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	176.400.000	144.000.000	32.400.000	82%
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	212.652.500	184.281.478	28.371.022	87%
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.196.222.179	4.868.706.208	327.515.971	94%
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.621.600.000	1.500.852.836	120.747.164	93%
			Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	120.666.634	19.333.366	86%
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	841.600.000	790.396.000	51.204.000	94%
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	352.800.000	350.168.000	2.632.000	99%
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	126.889.202	23.110.798	85%
			Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	137.200.000	112.733.000	24.467.000	82%
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapanagan KB (PKB/PLKB)	962.580.000	944.933.600	17.646.400	98%
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	962.580.000	944.933.600	17.646.400	98%
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.334.139.679	2.176.392.272	157.747.407	93%
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	42.750.000	36.750.000	6.000.000	86%
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.291.389.679	2.139.642.272	151.747.407	93%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI CAPAIAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	277.902.500	246.527.500	31.375.000	89%
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	68.652.500	68.590.500	62.000	100%
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	-	3.750.000	0%
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Keluarga Berkualitas	205.500.000	177.937.000,00	27.563.000	87%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.956.696.380	1.548.124.748	408.571.632	79%
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	381.696.380	297.537.200	84.159.180	78%
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000	15.084.000	4.116.000	79%
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	62.496.380	47.553.200	14.943.180	76%
			Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	234.900.000	65.100.000	78%
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.575.000.000	1.250.587.548	324.412.452	79%
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	750.000.000	594.545.798	155.454.202	79%
Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	825.000.000	656.041.750	168.958.250	80%			
TOTAL JUMLAH				11.080.132.212	10.085.895.738	994.236.474	91,03%

A.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan yang terdapat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. Sasaran program tersebut adalah mengendalikan kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas keluarga, Dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas di dukung oleh 4 Program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan Total Pagu 11.080.132.212 dan Realisasi 10.085.895.738 (91,03%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Memiliki 4 kegiatan dengan 11 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp., 5.196.222.179 dan realisasi sebesar Rp. 4.868.706.208,- (93.70%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Memiliki 5 sub kegiatan

- Sub Kegiatan Promosi Dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronikserta Media Luar Ruang
Indikator Kinerjanya adalah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana dengan target sebanyak 16 dokumen dan realisasi target kinerjanya adalah 16 dokumen (100%) dengan besaran anggarannya adalah sebesar Rp. 150.000.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 126.889.202 (84,59%).
- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Indikator Kinerjanya adalah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Brencana) dengan target sebanyak 16 laporan dan realisasi target kinerjanya adalah 1 laporan (100%) kecamatan serta besaran anggarannya adalah sebesar Rp. 841.600.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 790.396.000 (93,92%).
- Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
Indikator Kinerjanya adalah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK dengan

target sebanyak 1 Laporan dan realisasi target kinerjanya adalah 1 Laporan (100%) serta besaran anggarannya adalah sebesar Rp. 140.000.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 120.666.634 (86,19%).

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)

Indikator Kinerjanya adalah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan target sebanyak 16 Laporan dan realisasi target kinerjanya adalah 16 Laporan (100%) serta besaran anggarannya adalah sebesar Rp.352.800.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 350.168.000 (99,25%).

- Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Indikator Kinerjanya adalah Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan *Unmeet Need* dengan target sebanyak 1 Laporan dan realisasi target kinerjanya adalah 1 Laporan (100%) serta besaran anggarannya adalah sebesar Rp. 137.200.000 dan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 112.733.000 (82,17%).

b. *Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*
Memiliki 1 sub kegiatan

- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah Kader mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan dengan target kinerjanya adalah 100 orang dan realisasinya adalah 976 orang sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 962.580.000 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 944.933.600 (98,17%)

c. *Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan*

Memiliki 2 sub kegiatan

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Indikator Kinerja adalah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dengan target kinerjanya adalah 1 laporan dan realisasinya adalah 1 laporan (100%) , sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 42.750.000 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 36.750.000 (85,96%).

- Sub Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator Kinerjanya Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), dengan target kinerjanya 150 orang dan realisasinya adalah 150 orang (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 2.291.389.679 dengan realisasi sebesar Rp. 2.139.642.272 (93,38%)

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Target kinerja 3 organisasi dan realisasinya adalah 3 organisasi (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 68.652.500 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 68.590.500 (99,91%)
- Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB. Target kinerja 1 Dokumen dan realisasinya adalah 1 (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 3.750.000 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0 (0%). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana yang diberikan oleh pihak BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini membutuhkan Narasumber/fasilitator sebagai pemateri dalam kegiatan, namun karena terbatasnya anggaran yang diberikan, honorarium untuk narasumber/fasilitator tidak dapat dianggarkan dan kegiatan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB. Target indikator kinerjanya adalah 17 Kampung dan realisasinya adalah 17 Kampung,

sedangkan anggarannya adalah Rp. 205.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 177.937.000 (86,59%)

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Memiliki 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.956.696.380,- dan realisasi sebesar Rp. 1.548.124.748 (79,12%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Target kinerjanya adalah 25 Unit dan realisasinya adalah 25 unit (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 300.000.000 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 234.900.000 (78,30%)

- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target kinerjanya adalah 1 Laporan dan realisasinya adalah 1 Laporan (96,83%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 62.496.380 dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 47.553.200 (76,09%)
- Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dengan target kinerjanya adalah 1 Laporan dan realisasinya sebanyak 1 laporan (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 19.200.000 dengan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 15.084.000 (78,56%).

b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)

dengan target kinerjanya adalah 16 Laporan dan realisasinya sebanyak 16 laporan (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 750.000.000 dengan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 594.545.798 (79,27%).

- Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita) dengan target kinerjanya adalah 16 Laporan dan realisasinya sebanyak 16 laporan (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 825.000.000 dengan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 656.041.750 (79,52%).

3. Program Pengendalian Penduduk

Memiliki 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 389.052.500,- dan realisasi sebesar Rp. 328.281.478 (84,38%) dengan rincian sebagai berikut:

a. *Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* Memiliki 2 sub kegiatan

- Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Target kinerjanya sebanyak 12 laporan dan realisasinya sebanyak 12 laporan (100%), sedangkan anggarannya sebesar Rp. 176.400.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 144.000.000 (81,63%).

- Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Target kinerjanya sebanyak 1 Dokumen dan realisasinya sebanyak 1 Dokumen (100%), sedangkan anggarannya sebesar Rp. 212.652.500 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 184.281.478 (86,66%).

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki 6 kegiatan dengan 11 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.538.161.153 dan realisasi sebesar Rp. 3.341.629.120 (94,45%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
Memiliki 1 sub kegiatan

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerjanya adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target kinerja sebanyak 6 dokumen dan realisasinya adalah 6 dokumen (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 12.861.612 dan realisasi adalah sebesar Rp. 12.324.812 (95,83%).
- b. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
Memiliki 1 sub kegiatan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan ini dengan target kinerja 30 Orang/bulan realisasi kinerja 26 Orang capaian kinerja 86,7% dengan pagu anggaran Rp. 2.749.611.800 realisasi keuangan Rp. 2.638.452.193 (95,96%)
- c. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
Memiliki 5 sub kegiatan
 - Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Alat Tulis Kantor dengan target 1 paket dan realisasinya 1 paket (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 114.951.321 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 114.921.101 (99,97%)
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator kinerjanya adalah sebanyak 1 paket dan realisasi sebanyak 1 paket (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.440 dan realisasi adalah sebesar Rp. 4.999.440 (100%)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerjanya adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target sebanyak 1 paket dan realisasi sebanyak 1 paket (100%) dengan anggarannya sebesar Rp.600.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp.600.000 (100%).
 - Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator kinerjanya adalah sebanyak 16 laporan dan realisasi sebanyak 12 laporan (75%) dengan anggaran sebesar Rp. 172.064.000 dan realisasi adalah sebesar Rp. 170.520.613 (99,10%)
- d. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya dengan target 1

unit dan realisasinya sebanyak 1 unit (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 48.216.180 dan realisasinya sebesar Rp. 45.995.200 (95,39%).

e. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerjanya adalah Penyediaan rekening listrik, telepon, internet dan air dengan target sebanyak 1 Laporan (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 6.800.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 3.831.756 (56,35%) karena pada saat perencanaan anggaran harga untuk biaya listrik yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000 sedangkan pemakaian pada tahun berjalan lebih kecil dari harga yang telah direncanakan.

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator kinerjanya adalah sebanyak 1 laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 201.940.000 dan realisasi adalah sebesar Rp. 146.110.000 (72,35%)

f. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :*

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerjanya adalah Perpanjangan dan Pembayaran Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 sebanyak 52 unit dan realisasi sebanyak 52 unit (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 207.900.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 184.828.189 (88,90%)

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Indikator kinerjanya adalah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 10 unit dan realisasinya adalah sebanyak 10 unit (100%), sedangkan anggarannya adalah sebesar Rp. 18.216.800 dan realisasi sebesar Rp. 18.200.000 (99,91%).

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam pengelolaan anggaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba selalu berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Namun perlu disadari, bahwa kapasitas anggaran yang disediakan dalam penggerakan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba masih terbatas, sehingga belum mampu memberikan ruang gerak dalam peningkatan akselerasi pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba. Kondisi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil capaian kinerja dan hasil analisis permasalahan, bahwa terdapat beberapa program/kegiatan yang mengalami penurunan kapasitas, yang berdampak menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan Program KB di setiap desa/kelurahan.

Kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena dapat menimbulkan ketidak seimbangan antara besarnya sasaran binaan (jumlah penduduk) dengan kapasitas anggaran pembinaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba. Berdasarkan DPPA Dinas dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 memperoleh alokasi anggaran APBD setelah perubahan sebesar 11.080.132.212 dan Realisasi 10.085.895.738 (91,03%) dengan Untuk lebih jelasnya realisasi keuangan per program pada DPPKB Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel di berikut ini

Tabel 3.4
Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Pelaksanaan Program/Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI CAPAIAN			SISA ANGGARAN	CAPAIAN
		KEUANGAN				
		S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.538.161.153	2.937.818.521	402.964.783	3.340.783.304	197.377.849	94%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.861.612	7.878.200	4.446.612	12.324.812	536.800	96%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.861.612	7.878.200	4.446.612	12.324.812	536.800	96%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.749.611.800	2.398.759.312	239.692.881	2.638.452.193	111.159.607	96%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.749.611.800	2.398.759.312	239.692.881	2.638.452.193	111.159.607	96%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.614.761	259.732.513	31.308.641	291.041.154	1.573.607	99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.951.321	110.660.000	4.261.101	114.921.101	30.220	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.440	-	4.999.440	4.999.440	-	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	600.000	-	600.000	600.000	-	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.064.000	149.072.513	21.448.100	170.520.613	1.543.387	99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.216.180	-	45.995.200	45.995.200	2.220.980	95%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.216.180	45.995.200	-	45.995.200	2.220.980	95%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.740.000	122.639.436	27.302.320	149.941.756	58.798.244	72%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.800.000	3.069.436	762.320	3.831.756	2.968.244	56%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.940.000	119.570.000	26.540.000	146.110.000	55.830.000	72%

Tabel 3.4
Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Pelaksanaan Program/Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI CAPAIAN			SISA ANGGARAN	CAPAIAN
		KEUANGAN				
		S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.538.161.153	2.937.818.521	402.964.783	3.340.783.304	197.377.849	94%
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	226.116.800	148.809.060	54.219.129	203.028.189	23.088.611	90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.900.000	131.909.060	52.919.129	184.828.189	23.071.811	89%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.216.800	16.900.000	1.300.000	18.200.000	16.800	100%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	389.052.500	189.544.769	138.736.709	328.281.478	60.771.022	84%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	389.052.500	189.544.769	138.736.709	328.281.478	60.771.022	84%
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	176.400.000	77.700.000	66.300.000	144.000.000	32.400.000	82%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	212.652.500	111.844.769	72.436.709	184.281.478	28.371.022	87%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.196.222.179	4.368.312.708	500.393.500	4.868.706.208	327.515.971	94%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.621.600.000	1.210.964.836	289.888.000	1.500.852.836	120.747.164	93%
Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	80.798.634	39.868.000	120.666.634	19.333.366	86%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	841.600.000	660.364.000	130.032.000	790.396.000	51.204.000	94%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	352.800.000	321.158.000	29.010.000	350.168.000	2.632.000	99%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	117.229.202	9.660.000	126.889.202	23.110.798	85%
Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	137.200.000	31.415.000	81.318.000	112.733.000	24.467.000	82%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	962.580.000	790.033.600	154.900.000	944.933.600	17.646.400	98%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	962.580.000	790.033.600	154.900.000	944.933.600	17.646.400	98%

Tabel 3.4

Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Pelaksanaan Program/Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI CAPAIAN			SISA ANGGARAN	CAPAIAN
		KEUANGAN				
		S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.196.222.179	4.368.312.708	500.393.500	4.868.706.208	327.515.971	94%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.334.139.679	2.144.945.272	31.447.000	2.176.392.272	157.747.407	93%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	42.750.000	35.550.000	1.200.000	36.750.000	6.000.000	86%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.291.389.679	2.109.395.272	30.247.000	2.139.642.272	151.747.407	93%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	277.902.500	222.369.000	24.158.500	246.527.500	31.375.000	89%
Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	68.652.500	57.896.000	10.694.500	68.590.500	62.000	100%
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	-	-	-	3.750.000	0%
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Keluarga Berkualitas	205.500.000	164.473.000	13.464.000	177.937.000,00	27.563.000	87%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.956.696.380	1.252.939.748	295.185.000	1.548.124.748	408.571.632	79%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	381.696.380	290.652.200	6.885.000	297.537.200	84.159.180	78%
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000	10.399.000	4.685.000	15.084.000	4.116.000	79%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	62.496.380	45.353.200	2.200.000	47.553.200	14.943.180	76%
Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	234.900.000		234.900.000	65.100.000	78%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.575.000.000	962.287.548	288.300.000	1.250.587.548	324.412.452	79%
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	750.000.000	444.945.798	149.600.000	594.545.798	155.454.202	79%
Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	825.000.000	517.341.750	138.700.000	656.041.750	168.958.250	80%
TOTAL JUMLAH	11.080.132.212	8.748.615.746	1.337.279.992	10.085.895.738	994.236.474	91,03%

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 11.080.132.212 dengan realisasi sebesar Rp. 10.085.895.738 (91.03%), sehingga sisa anggaran yang belum dapat direalisasikan adalah sebesar 994.236.474 (8.97%). Jika ditinjau dari korelasi antara capaian kinerja dan penganggaran, memang masih terdapat beberapa program/kegiatan yang perlu terus didorong kemajuannya.

Penyerapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, didasarkan pada prinsip-prinsip:

- (1) perencanaan strategis partisipatif,
- (2) pengelolaan keuangan, penganggaran dan akuntansi,
- (3) pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) yang konsisten dari waktu ke waktu

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 ini adalah merupakan salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Toba. Laporan Kinerja ini adalah merupakan ringkasan pelaksanaan kegiatan atas Perjanjian Kinerja seperti telah ditetapkan di awal tahun anggaran 2024 antara Bupati Toba dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. Selama tahun anggaran 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba telah melaksanakan kinerja sebagian berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Target pencapaian kinerja seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut tergolong berhasil berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba seperti tersebut dalam dalam Peraturan Bupati Toba Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sehingga tujuan dan sasaran seperti yang tertera dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 diperoleh bahwa hasil rata-rata realisasi kinerja indikator utama adalah sebesar 91,03% persen dari target yang sudah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, namun jika dilihat dari Laporan Keuangan atau Realisasi Keuangan besaran pencapaiannya adalah 91,03% persen.

B. LANGKAH – LANGKAH KEDEPAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 ini telah menyajikan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian target seperti telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026 dan secara rinci telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba masih belum dapat memenuhi target kinerja seperti telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan rencana aksi Tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba masih tergolong rendah dalam pencapaian target, dibawah ini disajikan beberapa upaya perbaikan ke depannya terhadap sasaran yang tidak dapat mencapai target diantaranya adalah :

1. Melakukan Program Penyuluhan ke setiap kecamatan dengan mengundang lintas sektoral untuk mendiskusikan dan mencari solusi untuk menangani masalah yang terjadi di desa seperti sanitasi yang buruk (Penyediaan air bersih) yang merupakan salah satu indikator *Stunting*, kemudian fasilitas sarana dan prasana untuk memudahkan masyarakat ber-KB.
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB, karena Faktor meningkatnya *Unmeet Need* dipengaruhi oleh Aksesibilitas akan fasilitas kesehatan, Rantai Pasok Alokon (Alat Kontrasepsi) yang harus lancar, SDM (PKB/PLKB) yang harus *dipush* untuk gencar mempromosikan program KB dan manfaatnya bagi kehidupan dimasa mendatang kepada masyarakat. Hal tersebut juga akan mendorong pemakaian alat kontrasepsi dengan metode jangka panjang (MKJP) yang aman dan sehat bagi masyarakat.

3. Pemanfaatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui media cetak seperti Spanduk, Brosur, *Leaflet*, dan Banner mengenai banyak hal tentang manfaat KB, Pencegahan *Stunting*, Bahaya menikah diusia dini bagi remaja dapat dituangkan melalui sosialisasi berbentuk media cetak yang dipasang disetiap kecamatan misalnya, kantor camata ataupun kantor desa/kelurahan serta di tempat yang padat penduduknya dan dapat dijangkau masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang intens mengenai masalah *Stunting* yang kemudian dikhususkan di desa yang masuk sebagai kategori kampung KB dengan mengundang ahli gizi ataupun fasilitator yang mumpuni dibidang kesehatan, kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menanyakan masalah terkait *Stunting* ataupun KB.

4. Membuat kegiatan khusus antara Dinas PPKB, Lintas Sektoral bersama dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) misalnya diskusi terbuka yang dilakukan secara intens untuk mendiskusikan masalah *Stunting* dan solusi permasalahannya.

C. INFORMASI KEUANGAN

Setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki informasi keuangan yang disajikan setiap tahunnya, guna melihat kinerja yang direncanakan apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak, tentu setiap program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sudah direncanakan diawal oleh berbagai pihak didukung oleh dana yang sudah ditetapkan bagi masing- masing OPD. Dana tersebut dipakai sesuai dengan perencanaan dan kemudian dilaporkan melalui informasi keuangan yang sudah disajikan berdasarkan aturan yang berlaku. Dibawah ini disajikan tabel data informasi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Toba tahun 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.080.132.212, Realisasi sebesar Rp. 10.085.895.738 (91,03%), sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 994.236.474 (8,97%).

Tabel 3.5
Informasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Toba Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI CAPAIAN							SISA ANGGARAN
			FISIK				KEUANGAN			
			S.D BULAN LALU (%)	BULAN INI (%)	S.D BULAN INI (%)	BOBOT TERTIMBANG	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.538.161.153	83,03%	17,29%	100,32%	32,03%	2.937.818.521	402.964.783	3.340.783.304	197.377.849
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.861.612	0,00%	17,29%	17,29%	0,02%	7.878.200	4.446.612	12.324.812	536.800
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.861.612	0,00%	34,57%	34,57%	0,04%	7.878.200	4.446.612	12.324.812	536.800
02.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.749.611.800	87,24%	31,38%	95,96%	23,81%	2.398.759.312	239.692.881	2.638.452.193	111.159.607
02.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.749.611.800	87,24%	8,72%	95,96%	23,81%	2.398.759.312	239.692.881	2.638.452.193	111.159.607
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.614.761	45,73%	54,04%	99,77%	2,63%	259.732.513	31.308.641	291.041.154	1.573.607
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.951.321	96,27%	3,71%	99,97%	1,04%	110.660.000	4.261.101	114.921.101	30.220
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.440	0,00%	100,00%	100,00%	0,05%	-	4.999.440	4.999.440	-
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600.000	0,00%	100,00%	100,00%	0,01%	-	600.000	600.000	-
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.064.000	86,64%	12,47%	99,10%	1,54%	149.072.513	21.448.100	170.520.613	1.543.387
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.216.180	0,00%	6,09%	79,87%	4,67%	-	45.995.200	45.995.200	2.220.980
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.216.180	95,39%	0,00%	95,39%	5,58%	45.995.200	-	45.995.200	2.220.980
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.740.000	0,00%	12,18%	64,35%	1,21%	122.639.436	27.302.320	149.941.756	58.798.244
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.800.000	45,14%	11,21%	56,35%	0,03%	3.069.436	762.320	3.831.756	2.968.244
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.940.000	59,21%	13,14%	72,35%	1,32%	119.570.000	26.540.000	146.110.000	55.830.000

TABEL 3.5
INFORMASI KEUANGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TOBA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	226.116.800	0,00%	16,30%	94,41%	94,41%	148.809.060	54.219.129	203.028.189	23.088.611
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.900.000	63,45%	25,45%	88,90%	88,90%	131.909.060	52.919.129	184.828.189	23.071.811
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.216.800	92,77%	7,14%	99,91%	99,91%	16.900.000	1.300.000	18.200.000	16.800
02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	389.052.500	0,00%	34,06%	86,66%	3,04%	189.544.769	138.736.709	328.281.478	60.771.022
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	389.052.500	52,60%	34,06%	86,66%	3,04%	189.544.769	138.736.709	328.281.478	60.771.022
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	176.400.000	44,05%	37,59%	81,63%	81,63%	77.700.000	66.300.000	144.000.000	32.400.000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	212.652.500	52,60%	34,06%	86,66%	86,66%	111.844.769	72.436.709	184.281.478	28.371.022
02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.196.222.179	74,68%	9,50%	84,18%	39,48%	4.368.312.708	500.393.500	4.868.706.208	327.515.971
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.621.600.000	74,68%	17,88%	92,55%	92,55%	1.210.964.836	289.888.000	1.500.852.836	120.747.164
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	57,71%	28,48%	86,19%	86,19%	80.798.634	39.868.000	120.666.634	19.333.366
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	841.600.000	78,47%	15,45%	93,92%	93,92%	660.364.000	130.032.000	790.396.000	51.204.000
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	352.800.000	91,03%	8,22%	99,25%	99,25%	321.158.000	29.010.000	350.168.000	2.632.000
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	78,15%	6,44%	84,59%	84,59%	117.229.202	9.660.000	126.889.202	23.110.798
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	137.200.000	22,90%	59,27%	82,17%	82,17%	31.415.000	81.318.000	112.733.000	24.467.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	962.580.000	0,00%	8,05%	8,05%	0,70%	790.033.600	154.900.000	944.933.600	17.646.400
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	962.580.000	82,07%	16,09%	98,17%	98,17%	790.033.600	154.900.000	944.933.600	17.646.400

TABEL 3.5
INFORMASI KEUANGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TOBA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.334.139.679	0,00%	1,03%	1,03%	0,22%	2.144.945.272	31.447.000	2.176.392.272	157.747.407
2.14.03.2.03.01	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	42.750.000	83,16%	2,81%	85,96%	85,96%	35.550.000	1.200.000	36.750.000	6.000.000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.291.389.679	92,06%	1,32%	93,38%	93,38%	2.109.395.272	30.247.000	2.139.642.272	151.747.407
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	277.902.500	0,00%	11,06%	11,06%	0,28%	222.369.000	24.158.500	246.527.500	31.375.000
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	68.652.500	84,33%	15,58%	99,91%	99,91%	57.896.000	10.694.500	68.590.500	62.000
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	3.750.000
2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Keluarga Berkualitas	205.500.000	80,04%	6,55%	86,59%	86,59%	164.473.000	13.464.000	177.937.000,00	27.563.000
02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.956.696.380	0,00%	15,09%	79,12%	13,97%	1.252.939.748	295.185.000	1.548.124.748	408.571.632
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	381.696.380	0,00%	65,64%	232,95%	232,95%	290.652.200	6.885.000	297.537.200	84.159.180
2.14.04.2.01.016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000	54,16%	24,40%	78,56%	78,56%	10.399.000	4.685.000	15.084.000	4.116.000
2.14.04.2.01.017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	62.496.380	72,57%	3,52%	76,09%	76,09%	45.353.200	2.200.000	47.553.200	14.943.180
2.14.04.2.01.018	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	78,30%	0,00%	78,30%	78,30%	234.900.000		234.900.000	65.100.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.575.000.000	0,00%	28,88%	170,55%	158,79%	962.287.548	288.300.000	1.250.587.548	324.412.452
2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	750.000.000	59,33%	19,95%	79,27%	79,27%	444.945.798	149.600.000	594.545.798	155.454.202
2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	825.000.000	62,71%	16,81%	79,52%	79,52%	517.341.750	138.700.000	656.041.750	168.958.250
TOTAL JUMLAH		11.080.132.212	79%	12%	91%	91,03%	8.748.615.746	1.337.279.992	10.085.895.738	994.236.474

Melalui tabel diatas kita dapat melihat data mengenai informasi keuangan DPPKB Kab. Toba selama kurun waktu satu tahun (2024). Persentase capaian dari seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dikerjakan sebesar 91.03 %. Dari hal tersebut dapat disimpulkan kinerja tidak mencapai sempurna atau 100%, namun DPPKB Kab. Toba selalu berusaha untuk menjadi OPD yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di kabupaten Toba khususnya.

Demikianlah Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Balige, 05 Februari 2024

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Toba**



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2024
